



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 4, No 2, 2024, Page 1-16

Ageing Society: Tantangan Dan Strategi Model Pentahelix Di Kabupaten Gunungkidul

Hani Puspita Dewi*1, Alma Febriana2, Silvia Arnita Prabintari3

Universitas Gunung Kidul

Abstrak: Periode kehidupan seorang lanjut usia (lansia) mengalami penurunan baik fisik dan sosial. Hal ini menimbulkan permasalahan dan ketergantungan pada kelompok lebih muda. Tulisan ini akan memberikan konsep dan pemikiran terkait isu peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui model pentahelix. Model pentahelix ini dapat sebagai strategi bagi pemangku kepentingan untuk mengkolaborasikan pengetahuan dan keterampilan dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Pemangku kepentingan yang dimaksud yaitu akademisi, perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), masyarakat, media dan pemerintah. Penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan analisa soft ware Nvivo 12 plus. Melalui penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi atas dasar kajian literatur yang telah dilakukan dengan tujuan peningkatan program layanan kesejahteraan sosial lansia lintas pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Lansia, Pemangku Kepentingan, Kesejahteraan Sosial

DOI: https://doi.org/
10.53697/iso.v4i2.1844

*Correspondence: Hani Puspita Dewi Email: <u>Hani.puspitadewi@ugk.ac.id</u>

Received: 04-10-2024 Accepted: 11-11-2024 Published: 01-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/

Abstract: The period of an elderly person's life experiences both physical and social decline. This creates problems and dependency in younger groups. This article will provide concepts and thoughts related to the issue of improving the social welfare of the elderly through the pentahelix model. This pentahelix model can be a strategy for stakeholders to collaborate knowledge and skills in improving the social welfare of the elderly. The stakeholders in question are historians, companies through Corporate Social Responsibility (CSR) programs, society, media and government. This research will be conducted through a descriptive qualitative approach using Nvivo 12 plus software analysis. This research can produce recommendations based on the literature review that has been carried out with the aim of improving social welfare service programs for the elderly across stakeholders.

Keywords: Elderly Person, Stakeholder, Social Welfare

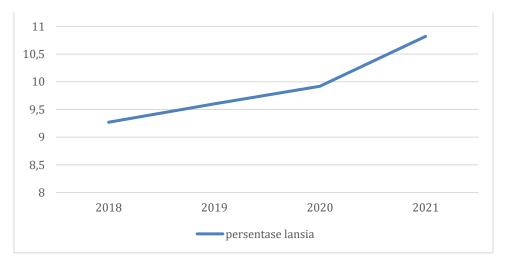
Pendahuluan

by/4.0/).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 bahwa yang dinamakan lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang berumur 60 tahun ke atas (Angesti, 2021). Peraturan yang lain adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Menurut aktivitas lansia dibagi menjadi lansia potensial dan tidak potensial. Lansia potensial adalah yang mampu bekerja sedangkan tidak potensial adalah yang tidak bekerja. Lansia yang tidak potensial dapat menjadi beban bagi suatu negara termasuk Indonesia (Pratama, 2022).

Tidak produktifnya dalam bekerja mengakibatkan tidak ada pendapatan yang di miliki. Tidak adanya pemasukan mengakibatkan kelompok produktif yang menanggung. Hal tersebut dinamakan rasio ketergantungan pada masyarakat. Rasio ketergantungan yang dimaksud adalah perbandingan penduduk usia produktif dengan penduduk lansia yang tidak produktif. Menurut sisi kesehatan bahwa kelompok lansia kurang produktif karena adanya penurunan fungsi organ tubuh. Susenas mencatat pada Maret 2022 yaitu penyakit menahun, panas, batuk, pilek, dan diare (Aqila et al, 2023).

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah lansia terbanyak. Dilihat dari era kependudukan termasuk era penduduk menua sejak tahun 2012 hingga sekarang. Era penduduk menua (aging population). Penuaan penduduk merupakan fenomena demografi yang tidak dapat diabaikan oleh seluruh dunia (Black & Oh, 2022). Akibatnya pada tahun 2045 di proyeksikan 1 dari 5 penduduk di Indonesia merupakan penduduk lanjut usia (Chao & Huang, 2016). Sedangkan tahun 2030 diproyeksikan 1 dari 6 merupakan lansia (6). Di Indonesia jumlah lansia mengalami peningkatan yang drastis sebanyakk lebih ari 10 persen dari jumlah penduduk dan naik 3 persen dari 2010-2021 (Diansari & Tanti, 2014).



Grafik 1. Presentase jumlah lansia di Indonesia

Jumlah lansia pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan. Pada 2018 jumlah lansia di Indonesia mencapai 9,27% dari jumlah penduduk. Jumlah lansia di tahun 2021 pun mencapai 10,82 dari jumlah penduduk. Hal ini juga dipengaruhi oleh peningkatan umur harapan hidup lansia. Pada tahun 2018 hingga 2021 menggambarkan penduduk berusia 71-72 tahun. Setiap tahunnya mulai 2018 mengalami kenaikan dari usia harapan hidup.

Provinsi Yogyakarta menempati provinsi dengan lansia tertinggi yaitu 16,69 persen. Pada tahun 2022 presentase jumlah lansia di kota lebih besar daripada desa. Meskipun jumlah lansia desa lebih sedikit tetapi rasio ketergantungan lansia di desa lebih besar yaitu 33,73 persen. Sedangkan rasio ketergantungan di kota sebanyak 24,01% (Erwanto et al, 2020). Jumlah lansia terlantar pun ikut meningkat. Jumlah lansia berdasarkan pemutakhiran Data Dinas Sosial Yogyakarta 2022 terdapat 26.525 (Falikhah, 2017).

Salah satu faktor yang memengaruhi masalah keterlantaran adalah kemiskinan. Dilihat dari jumlah penduduk miskin bahwa wilayah termiskin setelah Bantul adalah Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten ini menjadi Salah satu kabupaten yang memiliki penduduk miskin sebanyak 12.282.000 sedangkan jumlah lansia terlantar juga cukup banyak yaitu pada tahun 2021 mencapai 157,680 dari jumlah penduduk seluruhnya yaitu 758,168. Dimana 1 dari 5 orang I Kabupaten Gunungkidul berusia lebih dari 60 tahun. Dari data tersebut menunjukkan bahwa menjadi tantangan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya tantangan mulai dari fisik, psikis, dan sosial (Fatmah et al, 2019)

Untuk mengurangi masalah lansia maka perlu dipersiapkan lebih berpendidikan, sehat dan mudahnya penerimaan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup (Fitzgerald & Caro, 2014). Berdasarkan cita-cita tersebut diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Irwansyah & Emungtyas, 2023). Berdasar dari peraturan tersebut memberikan arahan untuk mengupayakan pelayanan lansia yang terencana, multidisiplin dan melibatkan pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (Hermawati, 2015).

Regulasi lain juga menyebutkan dari Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Perda ini mengatur tentang pelayanan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia baik dari tingkat keluarga, keluarga pengganti, masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan dinas terkait. Pelayanan ini mulai dari promotif, preventif dan kuratif. Dilihat dari strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Tahun 2022 bahwa salah satu sasaran adalah terwujudnya pemenuhan hak-hak lansia (Moulaert et al, 2016). Dari regulasi tersebut dapat dilihat bahwa perlunya koordinasi dan kerjasama untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak lansia dan peningkatan kesejahteraan sosial lansia (Menee el al 2011). Oleh karena itu regulasi perlu ditegakkan untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial lansia. Tulisan ini ini penting dilakukan untuk menganalisis melalui kebijakan, program pelayanan, dan kewenangan dalam peningkatan kesejahteraan lansia dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, masyarakat maupun swasta yang terlibat (Meeks, 2022).

Berbagai penelitian terkait lansia dalam peningkatan kesejahteraan sosial berfokus pada program swasta maupun pemerintah. Selain itu belum ada penelitian yang mengangkat subjek pada program di Kabupaten Gunungkidul. Perlu adanya penelitian terkait program yang dijalankan dari pendekatan pentahelix untuk mengupayakan kesejahteraan sosial lansia (Menee & Novek, 2020). Dilihat dari beberapa artikel bahwa penelitian yang akan diteliti oleh peneliti belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah rekayasa model pentahelix untuk memberikan program yang inovasi dan komperehensif bagi lanjut usia agar sesuai dengan regulasi tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (Neville et al, 2016; Russell et al, 2021).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif berbasis metode digital baik dalam pengumpulan data maupun pengolahan data. Penelitian ini menggunakan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber data dan kebijakan serta program yang telah dilakukan lembaga-lembaga. Pencarian artikel ini

menggunakan search engeni google, google scholar, JSTOR, dan situs pencarian jurnal internasional. Pencarian kata kunci dengan fokus pada model pentahelix program pelayanan pemerintah dan layanan peningkatan lansia. Kata kunci ini di dapat dari munculnya dalam literatur-literatur terkait pelayanan peningkatan kesejahteraan lansia. Adapun kata kunci yang dapat dipakai yaitu sebagai berikut:



Bagan 1. Proses Penelitian

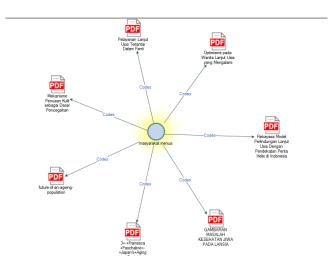
Sumber lain yang mendukung yaitu website resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Provinsi dan pusat. Penulis akan mengambil data dari beritaberita mulai tahun 2019-2023 yang berkaitan dengan program pelayanan lansia di Kabupaten Gunungkidul. Data-data tersebut akan menjadi data pendukung dalam melengkapi kajian literatur. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus sehingga menghasilkan data yang kemudian dianalisa secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Dilihat dari penelitian terdahulu bahwa model penta helix ini banyak berkaitan dengan pariwisata, kewirausahaan, dan teknologi. Penelitian terkait program layanan lansia berbasis penta helix ini terbatas dan kurang menjadi tren. Berdasarkan olah data memperoleh 120 artikel yang berkaitan tentang kelansiaan untuk dijadikan dasar dalam penulisan artikel ini. Berdasar penelitian terdahulu dan terkait program layanan lansia ahwa pendekatan penta helix merupakan peluang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk mengembangkan keilmuan layanan lansia dengan model tersebut (Sardjono et al, 2022).

Paradigma lama dalam penyelenggaraan kesejahteraan lansia di Indonesia terfokus pada pemahaman bahwa perlindungan sosial bagi lansia adalah tanggung jawab eksklusif pemerintah, yang sering kali diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, paradigma baru yang muncul menandai pergeseran penting dalam pandangan tersebut. Paradigma baru menekankan pada

pendekatan yang lebih holistik, menitiberatkan pada aspek preventif dan pemberdayaan, serta mempertimbangkan alternatif terakhir pada tahap rehabilitatif hingga kuratif (Savitri, 2019).



Gambar 3 hasil project map olah data Nvivo 12 Plus tentang masyarakat menua

Hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya memperkuat kemandirian dan kualitas hidup lansia, sambil tetap memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan mereka (Suriastini, 2019). Dengan demikian, paradigma baru ini menantang kita untuk bergerak menuju penyelenggaraan kesejahteraan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan bagi populasi lansia di Indonesia. Pendekatan ini juga mempertimbangkan alternatif terakhir dalam spektrum penyelenggaraan kesejahteraan, mulai dari tahap rehabilitatif hingga kuratif, sesuai dengan kebutuhan individu lanjut usia (Sir et al, 2023). Dengan demikian, pendekatan baru ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih proaktif dalam memperkuat keberdayaan dan kemandirian lanjut usia, serta memberikan layanan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan mereka (Torku et al, 2021).

Mewujudkan lanjut usia yang berkualitas, sehat, mandiri, dan produktif memerlukan kolaborasi yang erat dari seluruh stakeholder atau komponen terkait (Tiraphat, 2020). Pertama-tama, pemerintah memiliki peran kunci dalam menyusun kebijakan yang mendukung kesejahteraan lanjut usia, termasuk penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, program pemberdayaan, dan peluang pendidikan serta pekerjaan (Phillips et al, 2018). Selain itu, sektor swasta juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia, baik melalui program kesehatan perusahaan yang inklusif maupun menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lanjut usia. Di samping itu, komunitas lokal juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan sosial dan lingkungan yang inklusif bagi lanjut usia (Sun et al, 2022;

Xie, 2019; Xiang et al, 2021), seperti program-program relawan, klub lansia, dan kegiatan sosial yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar-generasi (Wang et al, 2021). Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan masyarakat lanjut usia dapat meraih kualitas hidup yang optimal dan terus berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Selain itu juga akademisi dn media sangat penting ikut serta dalam pengarustamaan ini.

Strategi Pelayanan pada Masyarakat Menua

Masyarakat di Yogyakarta, khususnya di Gunungkidul, sedang menghadapi tantangan yang signifikan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan holistik untuk memastikan kesejahteraan lansia. Salah satu strategi utama adalah memperkuat layanan kesehatan yang khusus ditujukan bagi lanjut usia. Ini melibatkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis untuk merespon kebutuhan khusus lansia, serta penyediaan program kesehatan preventif yang dapat membantu mencegah penyakit kronis yang umum terjadi pada lansia (Van Hoof, 2021).

Selain itu, pengembangan program pemberdayaan ekonomi bagi lansia menjadi strategi penting lainnya. Pemerintah daerah Gunungkidul dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan komunitas lokal untuk menciptakan peluang kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lansia. Program pelatihan keterampilan dan usaha kecil menengah (UKM) bagi lansia bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, sehingga mereka tetap produktif dan memiliki penghasilan sendiri. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan finansial, tetapi juga memberikan rasa harga diri dan kepuasan hidup bagi lansia.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan perawatan lansia juga perlu ditingkatkan. Kampanye edukasi melalui media massa dan kegiatan komunitas bisa membantu mengubah sikap dan pandangan masyarakat terhadap lansia. Dengan membangun kesadaran dan empati, masyarakat diharapkan lebih peduli dan aktif dalam mendukung kehidupan lansia di lingkungan mereka. Program pendidikan keluarga yang mengajarkan tentang perawatan lansia juga bisa diimplementasikan, sehingga anggota keluarga mampu memberikan perawatan yang tepat di rumah (Vibriyanti, 2019).

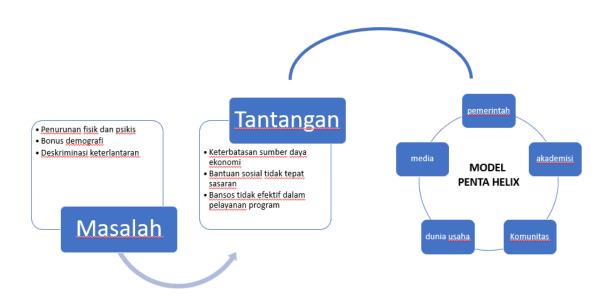
Infrastruktur yang ramah lansia adalah aspek penting lain dalam strategi ini. Pemerintah daerah dapat mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur publik agar lebih aksesibel bagi lansia. Ini termasuk pembangunan trotoar yang aman, fasilitas umum yang mudah diakses, serta penyediaan transportasi umum yang nyaman dan aman untuk

lansia. Dengan infrastruktur yang memadai, lansia dapat lebih mandiri dalam beraktivitas sehari-hari dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Terakhir, penguatan jejaring sosial dan dukungan komunitas bagi lansia sangat krusial. Pembentukan kelompok-kelompok pendukung lansia, seperti klub lansia dan pusat kegiatan lansia, dapat memberikan platform bagi mereka untuk bersosialisasi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung. Komunitas yang kuat dan inklusif dapat membantu mengurangi isolasi sosial yang sering dialami lansia dan memberikan mereka rasa kebersamaan dan dukungan emosional. Melalui strategi-strategi ini, diharapkan Gunungkidul dapat menjadi wilayah yang lebih ramah dan mendukung bagi penduduk lanjut usia, memastikan mereka menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang baik.

Model Pentahelix Masyarakat Menua di Gunungkidul

Model pentahelix untuk mengatasi tantangan masyarakat menua di Gunungkidul melibatkan lima elemen utama: pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan media. Model ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam menghadapi peningkatan jumlah lansia, memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan kualitas yang baik dan tetap produktif. Kolaborasi ini memungkinkan berbagai pihak untuk berkontribusi berdasarkan keahlian dan sumber daya masing-masing, menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif.



Gambar 2 Model Penta Helix Masyarakat Menua

Pemerintah memainkan peran sentral dalam pentahelix dengan menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung kesejahteraan lansia. Pemerintah daerah Gunungkidul dapat memperkuat program kesehatan khusus lansia, memperbaiki infrastruktur yang

ramah lansia, serta menyediakan bantuan sosial yang memadai. Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi kolaborasi antar-stakeholder melalui forum-forum diskusi dan kemitraan publik-swasta.

Pemerintah Daerah memainkan peran sentral dalam pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media, dengan menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung kesejahteraan lansia, khususnya di wilayah perdesaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan strategis yang inklusif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan lansia. Peran pemerintah salah satunya mengupayakan implementasi pada peraturan daerah yang telah dibuat.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan langkah progresif dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di wilayah tersebut. PERDA ini mencakup berbagai aspek penting seperti pelayanan kesehatan, pemberdayaan sosial, dan peningkatan kualitas hidup lansia. Salah satu poin utama dalam PERDA ini adalah penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas bagi lansia. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memastikan adanya fasilitas kesehatan yang ramah lansia, termasuk layanan kesehatan keliling di wilayah-wilayah terpencil dan penyediaan obat-obatan gratis bagi lansia yang kurang mampu. Selain itu, PERDA ini juga menekankan pentingnya program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan bagi lansia.

Selain aspek kesehatan, PERDA Nomor 12 Tahun 2023 juga menyoroti pentingnya pemberdayaan sosial dan ekonomi lansia. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk menciptakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif lansia dalam masyarakat. Misalnya, pelatihan keterampilan dan usaha kecil yang dapat membantu lansia tetap produktif dan mandiri secara ekonomi. PERDA ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi sosial dalam mendukung kesejahteraan lansia, melalui kegiatan-kegiatan sosial, budaya, dan rekreasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Dengan adanya PERDA ini, diharapkan kesejahteraan lansia di Kabupaten Gunungkidul dapat terjamin, sehingga mereka dapat menjalani masa tua dengan dignitas dan kualitas hidup yang lebih baik.

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat mendorong kolaborasi antara berbagai pihak dalam pentahelix untuk menciptakan lingkungan yang ramah lansia. Dengan bekerja sama dengan akademisi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan penelitian dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Dunia usaha juga dapat diajak berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan lansia. Media, sebagai bagian dari pentahelix, dapat digunakan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperhatikan kesejahteraan lansia dan menghilangkan stigma negatif terhadap penuaan.

Di wilayah perdesaan, peran Pemerintah Daerah sangat krusial dalam memastikan bahwa lansia tidak terpinggirkan dari perkembangan dan pelayanan sosial. Dengan menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif, seperti transportasi yang mudah diakses dan fasilitas umum yang ramah lansia, Pemerintah Daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan aktif dan sehat bagi lansia. Selain itu, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program kesejahteraan lansia, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa lansia di perdesaan mendapatkan perhatian dan layanan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Harapannya adanya Perda Nomor 12 Thaun 2023 ini dapat mewujudkan kegiatan yang ramah lansia baik perencanaan dan pelaksanaan.

Akademisi dan lembaga penelitian juga memiliki peran penting dalam model pentahelix ini. Mereka dapat melakukan penelitian mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh lansia di Gunungkidul. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, akademisi juga bisa berperan dalam memberikan pelatihan kepada tenaga medis dan sosial, serta menyebarkan pengetahuan tentang perawatan lansia yang efektif kepada masyarakat luas.

Keterlibatan dunia riset dapat menyediakan landasan ilmiah yang kuat untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif. Akademisi dan peneliti dapat melakukan studi mendalam mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh lansia, serta mengevaluasi dampak dari berbagai program yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dan organisasi lainnya untuk mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, akademisi juga dapat membantu mengembangkan kurikulum dan program pelatihan bagi para tenaga kesehatan dan pekerja sosial, memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melayani lansia dengan baik.

Selain itu, akademisi dan lembaga penelitian dapat memainkan peran kunci dalam inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan lansia. Misalnya, mereka dapat bekerja sama dengan industri untuk menciptakan alat bantu kesehatan atau teknologi digital yang ramah lansia, yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka. Kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan sektor lainnya dalam model pentahelix dapat memastikan bahwa semua intervensi yang dilakukan berbasis bukti dan dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi lansia. Dengan demikian, keterlibatan akademisi dan lembaga penelitian tidak hanya meningkatkan efektivitas program pelayanan kesejahteraan sosial, tetapi juga memastikan

bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada penelitian yang solid dan inovasi yang relevan.

Komunitas lokal merupakan elemen kunci lainnya dalam pentahelix. Komunitas lokal memegang peran kunci dalam model pentahelix untuk kesejahteraan lansia, terutama dalam implementasi konsep age-friendly community atau komunitas yang ramah usia lanjut. Komunitas lokal, yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, organisasi nirlaba, dan individu, dapat menyediakan dukungan sosial langsung dan layanan yang dibutuhkan oleh lansia. Mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah lansia dengan mengadakan kegiatan sosial, edukatif, dan rekreatif yang memungkinkan lansia tetap aktif dan terlibat dalam masyarakat. Selain itu, komunitas lokal dapat bekerja sama dengan pemerintah dan sektor lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan lansia di wilayah mereka dan mengembangkan solusi yang tepat, seperti akses yang lebih baik ke fasilitas umum, transportasi, dan layanan kesehatan. Dukungan dari komunitas sangat penting dalam membangun lingkungan yang inklusif dan suportif bagi lansia. Melalui kelompok-kelompok masyarakat, seperti klub lansia dan pusat kegiatan sosial, lansia dapat tetap aktif dan terlibat dalam berbagai kegiatan. Komunitas juga dapat berfungsi sebagai jaringan pendukung yang memberikan bantuan dan pendampingan sehari-hari bagi lansia, mengurangi risiko isolasi sosial.

Selain itu, komunitas lokal memiliki peran penting dalam mempromosikan kesadaran dan mengubah persepsi masyarakat terhadap lansia. Melalui kampanye dan program edukasi, komunitas lokal dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap lansia, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi age-friendly community memerlukan dukungan aktif dari semua lapisan masyarakat, dan komunitas lokal berada di garis depan dalam memfasilitasi interaksi antar generasi dan menciptakan jaringan dukungan yang solid untuk lansia. Dengan keterlibatan aktif komunitas lokal, program-program kesejahteraan lansia dapat lebih mudah diakses dan diterima, sehingga lansia dapat menikmati kehidupan yang lebih bermakna, aman, dan sejahtera di lingkungan mereka sendiri.

Dunia usaha dan media juga memiliki kontribusi signifikan dalam model pentahelix. Dunia usaha dapat menciptakan peluang kerja bagi lansia, menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta mendukung program-program sosial melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sementara itu, media berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lansia, mengedukasi publik tentang pentingnya perlindungan dan perawatan lansia, serta mempromosikan program dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan lansia. Dengan sinergi antara kelima elemen ini,

model pentahelix dapat menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk mendukung masyarakat menua di Gunungkidul.

Dunia usaha berperan penting dalam model pentahelix untuk peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Melalui CSR, perusahaan dapat mendanai dan mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Misalnya, perusahaan dapat menyediakan dana untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang ramah lansia, mengadakan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan lansia secara ekonomi, atau mensponsori program-program sosial dan rekreatif yang dirancang khusus untuk mereka. Selain itu, perusahaan dapat mendorong karyawan mereka untuk terlibat sebagai relawan dalam kegiatan yang mendukung lansia, menciptakan budaya perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan berkontribusi secara aktif melalui CSR, dunia usaha dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi lansia, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan bahagia.

Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Menua

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat menua di Gunungkidul menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek keuangan atau finansial. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh banyak lansia. Sebagian besar lansia di Gunungkidul berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Kurangnya tabungan pensiun dan aset finansial lainnya membuat mereka sangat rentan terhadap kemiskinan di usia tua.

Tantangan lainnya adalah terbatasnya akses lansia terhadap layanan keuangan formal. Banyak lansia yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memanfaatkan layanan perbankan dan keuangan modern, seperti kredit mikro, asuransi, dan produk keuangan lainnya yang dapat membantu mereka mengelola risiko finansial. Kendala ini sering diperparah oleh rendahnya literasi keuangan di kalangan lansia, sehingga mereka kurang memahami cara mengelola keuangan secara efektif dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia.

Selain itu, ketergantungan finansial lansia pada anggota keluarga juga menjadi masalah. Di banyak kasus, lansia di Gunungkidul bergantung pada dukungan anak atau kerabat mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dengan meningkatnya tekanan ekonomi pada keluarga muda yang juga harus mengurus anak-anak mereka

sendiri, dukungan finansial untuk lansia sering kali tidak mencukupi. Hal ini menciptakan beban ganda bagi keluarga dan memperburuk kondisi ekonomi lansia.

Pemerintah daerah Gunungkidul menghadapi tantangan dalam menyediakan program bantuan sosial yang memadai dan berkelanjutan bagi lansia. Sumber daya anggaran yang terbatas dan prioritas pembangunan lainnya sering kali menyebabkan alokasi dana untuk kesejahteraan lansia menjadi kurang optimal. Selain itu, birokrasi yang rumit dan distribusi bantuan yang tidak merata dapat menghambat efektivitas program bantuan sosial, sehingga banyak lansia yang tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Program pemberdayaan ekonomi yang dirancang khusus untuk lansia, seperti pelatihan keterampilan dan usaha kecil menengah (UKM), dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka. Peningkatan literasi keuangan dan akses terhadap layanan keuangan juga penting untuk memastikan lansia dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Selain itu, program bantuan sosial perlu ditingkatkan dan disederhanakan agar lebih efektif dan tepat sasaran, memastikan bahwa semua lansia yang membutuhkan mendapatkan dukungan yang layak. Dengan strategi yang tepat dan kerja sama yang kuat, tantangan finansial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menua di Gunungkidul dapat diatasi.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat menua di Gunungkidul melalui bantuan sosial menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pertama, masalah utama yang dihadapi adalah pendistribusian bantuan sosial yang tidak merata. Seringkali, bantuan sosial tidak menjangkau semua lansia yang membutuhkan karena masalah geografis, terutama di daerah terpencil dan pedesaan seperti di Gunungkidul. Hambatan infrastruktur dan akses transportasi yang terbatas membuat banyak lansia kesulitan mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, data penerima bantuan sosial sering kali kurang akurat dan tidak terupdate. Ketidakakuratan data ini menyebabkan banyak lansia yang sebenarnya membutuhkan bantuan malah terlewatkan, sementara ada juga yang mendapatkan bantuan ganda atau tidak sesuai dengan kondisi ekonominya. Sistem pendataan yang kurang efisien dan tidak terintegrasi dengan baik membuat proses identifikasi penerima bantuan menjadi tidak optimal, sehingga distribusi bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Tantangan lainnya adalah birokrasi yang rumit dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial. Prosedur yang berbelit-belit dan persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi oleh lansia, terutama mereka yang kurang terdidik atau memiliki keterbatasan fisik, membuat banyak lansia tidak mampu mengakses bantuan sosial dengan mudah.

Birokrasi yang kompleks juga sering kali memperlambat proses penyaluran bantuan, menyebabkan penundaan yang merugikan para lansia yang sangat membutuhkan bantuan segera.

Selain itu, masalah keberlanjutan dan konsistensi program bantuan sosial juga menjadi tantangan. Banyak program bantuan sosial yang hanya bersifat sementara atau tidak memiliki pendanaan jangka panjang yang pasti. Ketidakpastian ini membuat lansia yang bergantung pada bantuan sosial merasa tidak aman dan khawatir tentang masa depan mereka. Program bantuan yang tidak konsisten juga dapat mengurangi efektivitas jangka panjang dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu adanya perbaikan dalam sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan efisien. Penggunaan teknologi digital untuk memperbarui data penerima dan mengoptimalkan proses distribusi bisa menjadi solusi yang efektif. Selain itu, penyederhanaan prosedur birokrasi dan penyesuaian persyaratan administrasi agar lebih mudah diakses oleh lansia juga diperlukan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan program bantuan sosial memiliki pendanaan yang berkelanjutan dan dapat memberikan dukungan jangka panjang yang konsisten. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tantangan dalam penyaluran bantuan sosial dapat diatasi, sehingga kesejahteraan masyarakat menua di Gunungkidul dapat terwujud secara lebih efektif.

Selain itu dalam implementasi model pentahelix untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia di Gunungkidul meliputi kurangnya koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan, yang sering kali menghambat integrasi dan efektivitas program. Ketidaksepakatan dan kurangnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas lokal, dan media dapat mengakibatkan duplikasi usaha, ketidakefisienan, dan hilangnya peluang untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, menjadi kendala signifikan dalam mencapai cakupan layanan yang luas dan berkelanjutan. Sumber daya yang terbatas menghambat pelaksanaan program yang direncanakan dan menurunkan kualitas serta jangkauan pelayanan yang dapat diberikan kepada lansia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih intensif dan koordinasi yang lebih baik antar semua pihak yang terlibat, serta strategi pengelolaan sumber daya yang lebih efektif.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tentang model pentahelix dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia di Gunungkidul menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas lokal, dan media, model pentahelix dapat

menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Pemerintah daerah berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung, akademisi menyediakan penelitian dan data untuk dasar pembuatan keputusan, dunia usaha memberikan dukungan finansial dan program CSR, komunitas lokal memfasilitasi interaksi sosial dan dukungan langsung, sementara media meningkatkan kesadaran publik dan mengubah persepsi masyarakat tentang lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan sinergi yang baik antar komponen pentahelix, program-program kesejahteraan lansia dapat lebih terstruktur dan berdampak positif secara signifikan.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan model pentahelix di Gunungkidul. Tantangan utama termasuk kurangnya koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan, yang sering kali menghambat integrasi dan efektivitas program. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, menjadi kendala dalam mencapai cakupan layanan yang luas dan berkelanjutan. Ada juga tantangan dalam mengubah stigma dan persepsi negatif tentang lansia di masyarakat, yang memerlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dan strategi yang jelas dari setiap elemen pentahelix, serta upaya kolaboratif yang lebih intensif untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program-program kesejahteraan lansia di Gunungkidul.

Berdasarkan penelitian tentang model pentahelix dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia di Gunungkidul, disarankan agar semua pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif untuk memastikan integrasi program yang lebih baik. Pembentukan forum atau tim koordinasi lintas sektor yang rutin bertemu dan berdiskusi dapat membantu mengatasi hambatan koordinasi. Selain itu, perlu adanya pengelolaan sumber daya yang lebih strategis, dengan memanfaatkan sinergi antar sektor untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan tenaga kerja yang tersedia. Penguatan kapasitas komunitas lokal dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang didukung oleh media juga penting untuk mengubah persepsi negatif tentang lansia dan mendukung partisipasi aktif mereka. Dengan demikian, program-program yang dirancang dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan, memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kesejahteraan lansia di Gunungkidul.

Referensi

- ANGESTI, N. V. (2021). Age-friendly Communities and Regional Disparity: The Case of Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Arszandi Pratama, S. T., & ST, D. M. F. Mempelajari Konsep Tata Ruang Ramah Lansia.
- Aqila, A. R., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA RAMAH LANSIA. Journal of Public Policy and Management Review, 12(3), 645-665.
- Black, K., & Oh, P. (2022). Assessing age-friendly community progress: What have we learned? The Gerontologist, 62(1), 6-17.

- Chao, T. S., & Huang, H. (2016). The East Asian age-friendly cities promotion–Taiwan's experience and the need for an oriental paradigm. Global Health Promotion, 23(1_suppl), 85-89.
- Campus, U. I., Campus, U. I., Campus, U. I., & Campus, U. I. (2014). The assessment of Depok as age friendly city (AFC). Journal of Biosciences and Medicines, 2(06), 5.
- Diansari, S. A., & Tanti, B. S. (2019, November). INDONESIA'S EFFORTS IN IMPLEMENTING THE INTERNATIONAL REGIME ON AGEING THROUGH AGE-FRIENDLY CIT
- Erwanto, R., Kurniasih, D. E., & Amigo, T. A. E. (2020). Pengembangan Dusun Ramah Lansia Melalui Pelaksanaan Sekolah Lansia Di Karet Kabupaten Bantul. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 4(6), 1334-1344.
- Falikhah, N. (2017). Bonus demografi peluang dan tantangan bagi Indonesia. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 16(32). Y ON 2030. In Proceeding International Conference (Vol. 1, No. 1, pp. 379-385).
- Fatmah, F., Dewi, V. P., & Priotomo, Y. (2019). Developing age-friendly city readiness: A case study from Depok city, Indonesia. SAGE Open Medicine, 7, 2050312119852510.
- Fitzgerald, K. G., & Caro, F. G. (2014). An overview of age-friendly cities and communities around the world. Journal of aging & social policy, 26(1-2), 1-18.
- Irwansyah, I., & Ernungtyas, N. F. (2023). Age-Friendly environment: A systematic literature review. In E3S Web of Conferences (Vol. 452, p. 07009). EDP Sciences.
- Hermawati, I., & Sos, M. (2015). Kajian tentang kota ramah lanjut usia. Yogyakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
- Moulaert, T., & Garon, S. (2016). Age-friendly cities and communities in international comparison. Cham, CHE: Springer International.
- Menec, V. H., Means, R., Keating, N., Parkhurst, G., & Eales, J. (2011). Conceptualizing age-friendly communities. Canadian Journal on Aging/La revue canadienne du vieillissement, 30(3), 479-493.
- Meeks, S. (2022). Age-friendly communities: Introduction to the special issue. The Gerontologist, 62(1), 1-5.
- Menec, V., & Novek, S. (2020). Making rural communities age-friendly: Issues and challenges. Rural Gerontology, 164-174.
- Neville, S., Napier, S., Adams, J., Wham, C., & Jackson, D. (2016). An integrative review of the factors related to building age-friendly rural communities. Journal of Clinical Nursing, 25(17-18), 2402-2412.
- Russell, E., Skinner, M. W., & Colibaba, A. (2021). Developing rural insights for building age-friendly communities. Journal of rural studies, 81, 336-344.
- Sardjono, W., Kusnoputranto, H., Utomo, H., & Sukardi, S. Community Participation in Urban Development in Realizing an Elderly Friendly City in Indonesia.

- Savitri, A. (2019). Bonus Demografi 2030: menjawab tantangan serta peluang edukasi 4.0 dan revolusi bisnis 4.0. Penerbit Genesis.
- Suriastini, W., Buffardi, A. L., & Fauzan, J. (2019). What prompts policy change? Comparative analyses of efforts to create age-friendly cities in 14 cities in Indonesia. Journal of Aging & Social Policy, 31(3), 250-270.
- Sir, D. P. S., Tambunan, S. S., Putri, A., & Gurning, F. P. (2023). Tantangan Dan Peluang Pembiayaan Kesehatan Di Indonesia Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Kesehatan, 1(6), 893-901.
- Torku, A., Chan, A. P. C., & Yung, E. H. K. (2021). Age-friendly cities and communities: A review and future directions. Ageing & Society, 41(10), 2242-2279.
- Tiraphat, S., Buntup, D., Munisamy, M., Nguyen, T. H., Yuasa, M., Nyein Aung, M., & Hpone Myint, A. (2020). Age-friendly environments in ASEAN plus three: Case studies from Japan, Malaysia, Myanmar, Vietnam, and Thailand. International journal of environmental research and public health, 17(12), 4523.
- Phillips, D. R., Woo, J., Cheung, F., Wong, M., & Chau, P. H. (2018). Exploring the age-friendliness of Hong Kong: opportunities, initiatives and challenges in an ageing Asian city. In Age-Friendly Cities and Communities (pp. 119-142). Policy Press.
- Sun, Y., Chao, T. Y. S., Au, D. W., Yung, E. H., & Woo, J. (2022). The age-friendly movement in an Asian context. In The Age-friendly Lens (pp. 89-103). Routledge.
- Xie, L. (2018). Age-friendly communities and life satisfaction among the elderly in urban China. Research on aging, 40(9), 883-905.
- Xiang, L., Tan, Y., Jin, X., & Shen, G. (2021). Understanding stakeholders' concerns of age-friendly communities at the briefing stage: a preliminary study in urban China. Engineering, Construction and Architectural Management, 28(1), 31-54.
- Wang, Y., Gonzales, E., & Morrow-Howell, N. (2017). Applying WHO's age-friendly communities framework to a national survey in China. Journal of Gerontological Social Work, 60(3), 215-231.
- van Hoof, J., & Marston, H. R. (2021). Age-friendly cities and communities: State of the art and future perspectives. International journal of environmental research and public health, 18(4), 1644.
- Vibriyanti, D. (2019). Surabaya menuju kota ramah lansia: peluang dan tantangan. Jurnal Kependudukan Indonesia, 13(2), 117-132